

OPOSISI ATAU INTEGRASI? Islam dan Kebangsaan di Indonesia



Mujiburrahman

Mujiburrahman, lulusan Pondok Pesantren Al-Falah Banjar Baru ini adalah dosen Fakultas Ushuluddin, IAIN Antasari Banjarmasin. Pada 1998, dia berangkat ke Montreal Canada untuk program MA di Faculty of Religious Studies, McGill University, dan selesai tahun 2000. Mulai tahun 2001, dia melanjutkan S-3 di Universiteit Utrecht dan selesai tahun 2006.

Sejumlah tulisannya terbit di beberapa jurnal internasional seperti *Islam and Christian-Muslim Relations* (1999 dan 2001), *the Muslim World* (2001) dan *Journal of Ecumenical Studies* (2001). Disertasinya berjudul *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order* diterbitkan oleh Amsterdam University Press/ ISIM, 2006. Selain menulis di berbagai jurnal ilmiah di tanah air, dia juga telah menerbitkan dua buku terjemahan kaya Muhammad 'Abid al-Jabiri, yaitu *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001) dan *Syura: Tradisi-Partikularitas-Universalitas* (Yogyakarta: LKiS, 2003).

Rasa kebangsaan (nasionalisme) kita sebagai orang Indonesia nampaknya kembali dipertanyakan setelah berbagai konflik berdarah bernuansa etnis dan agama menimpa

beberapa daerah di Indonesia sejak tahun-tahun terakhir kekuasaan Soeharto hingga lahirnya era reformasi yang sudah hampir satu dekade ini. Salah satu upaya untuk mengetahui kadar rasa kebangsaan itu, khususnya di kalangan kaum Muslim, adalah survei yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, di tahun 2007. Survei ini melibatkan 1200 responden dengan jumlah seimbang antara laki-laki dan perempuan berusia 17-60 tahun, yang terdiri dari mereka yang tinggal di desa (58%) dan di kota (42%).¹

Jumlah 1200 orang responden tentu saja sulit dikatakan benar-benar mewakili rakyat Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta orang. Apalagi, berdasarkan data yang diberikan PPIM, kita tidak diberitahu asal-usul dari responden yang diambil secara acak itu (dari wilayah mana dan etnis apa). Padahal penduduk daerah-daerah yang memiliki kekayaan hasil bumi seperti Aceh, Papua, Riau dan Kalimantan Timur, atau daerah-daerah yang belum lama ini mengalami konflik berdarah

¹ PPIM, *Islam dan Kebangsaan: Temuan Survey Nasional* (Jakarta: PPIM, 2007). Sumber ini merupakan bahan presentasi yang dibuat dalam program power point. Semua data tentang survey PPIM yang disebutkan dalam makalah ini merujuk ke sumber ini.

seperti Ambon, Poso, dan Sampit, boleh jadi akan menunjukkan pandangan kebangsaan yang berbeda dengan penduduk Indonesia yang tinggal di daerah-daerah lain.

Yang lebih perlu dipertanyakan dari hasil survei PPIM ini adalah adanya kerangka berpikir yang melandasi penelitian ini, yaitu kerangka yang menempatkan paham kebangsaan dan keislaman secara diametrik, berhadap-hadapan, di mana yang satu seolah selalu mengancam yang lain. Ancaman Islam terhadap nasionalisme, menurut survei ini, ditunjukkan oleh sikap intoleransi keagamaan kaum Muslim terhadap non-Muslim, dan sikap tersebut “memiliki hubungan positif dengan sikap menjadikan agama sebagai dasar perumusan identitas utama”. Maka tak heran kalau kesimpulan akhir survei ini dan rekomendasinya berbunyi: “Semua penjelasan di atas memberikan kita satu bukti kuat bahwa usaha pengarusutamaan (*mainstreaming*) kebangsaan, khususnya di atas faktor-faktor keagamaan, menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.”

Terlepas dari apakah survei ini representatif atau tidak, saya akan menunjukkan bahwa hasil survei tersebut dapat dibaca dengan kerangka lain, yakni bukan dalam kerangka oposisi Islam melawan nasionalisme, melainkan sebagai hasil sementara dari dialektika Islam dan nasionalisme itu sendiri yang telah lama berlangsung dan mungkin tak akan kunjung selesai. Dengan melihatnya secara dialektis, kita tidak akan terjebak pada kerangka perseteruan antara Islam

dan nasionalisme belaka, melainkan juga kemungkinan adanya integrasi antara keduanya. Dengan demikian, rekomendasi yang diberikan bukannya “pangarusutamaan kebangsaan, khususnya di atas faktor-faktor keagamaan”, melainkan bagaimana mengintegrasikan paham keindonesian dan keislaman sehingga keduanya tidak saja berkoeksistensi, melainkan juga saling memperkuat. Pandangan yang terakhir ini bukanlah sebuah utopia, melainkan telah ditunjukkan oleh berbagai kenyataan sejarah yang dialami oleh bangsa Indonesia.

Nasionalisme Indonesia di Era Kolonialisme

Gerakan nasionalisme di Indonesia tampaknya baru dimulai pada awal abad ke-20, tidak lama setelah kebijakan “politik etis” dilaksanakan oleh Belanda, yang resminya dimulai tahun 1901. Dalam wacana sejarah yang dipopulerkan penguasa Indonesia selama ini, apa yang disebut dengan “kebangkitan nasional” biasanya dilekatkan pada gerakan Budhi Oetomo (BO) yang lahir tahun 1908. Tetapi jika diperhatikan lebih cermat, BO sebenarnya adalah kebangkitan “kaum priyayi Jawa” yang ingin membela posisi mereka karena semakin terjepit oleh cengkaman kolonialisme Belanda. Karena itu, sebagian ahli lebih cenderung kepada Sarekat Islam (SI), yang didirikan tahun 1912, sebagai titik awal dari kebangkitan nasional kita. Alasannya, berbeda dengan BO yang anggotanya terbatas di Jawa dan Madura, SI mencapai perkembangan yang sangat luar biasa

dengan cabang-cabang yang dibuka di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan-kegiatan SI juga mencakup bidang yang sangat luas dari sosial, agama, pendidikan, hingga politik.²

Jika kita menerima pandangan bahwa SI adalah awal dari kebangkitan nasional kita, maka nampak sekali bahwa nasionalisme Indonesia sulit dipisahkan dari Islam. Nasionalisme pada saat itu tampaknya diartikan sebagai suatu perlawanan terhadap kolonialisme. Bahkan jika ditarik jauh ke belakang, perang-perang daerah melawan Belanda di abad ke-18 dan ke-19 di berbagai tempat seperti Aceh dengan Cut Nyak Dien, Jawa oleh Pangeran Diponegoro, Banjarmasin oleh Pangeran Antasari, dan Sulawesi Selatan oleh Sultan Hasanuddin, tentu kita akan menemukan fakta yang sulit dibantah bahwa Islam telah menjadi sebuah "ideologi perlawanan melawan penjajah kafir" dalam perang-perang itu. Namun tentu saja kita tidak bisa mengatakan bahwa orang seperti Diponegoro dan Antasari adalah tokoh-tokoh yang ingin mendirikan sebuah negara bangsa bernama Indonesia. Mereka lebih tepat dilihat sebagai pejuang-pejuang lokal yang ingin membela kepentingan yang bersifat lokal pula.

Jika Islam tampaknya sejalan dengan nasionalisme dalam arti perlawanan terhadap penjajah, mengapa kemudian terjadi "perseteruan" antara Islam dan



pro.corbis.com

nasionalisme dalam sejarah bangsa kita? Jawaban sederhana atas masalah ini adalah, ketika musuh bersama telah sirna, maka teman-teman sendirilah yang menjadi musuh. Tentu saja, kenyataan yang terjadi lebih kompleks dan rumit, karena perseteruan itu seringkali berujung pada kompromi-kompromi sehingga negara ini tetap bisa dipertahankan hingga sekarang. Di sisi lain, akar perseteruan tersebut memang cukup dalam dan tidak bisa dinilai hanya sebagai suatu kepentingan politik sesaat. Karena itu, perseteruan, atau yang lebih tepatnya, dialektika, antara Islam dan nasionalisme di Indonesia ini terus bergulir tak berkesu-

² Tentang data perkembangan SI di berbagai wilayah di tanah air, lihat A.PE Korver, *Sarekat Islam, Gerakan Ratu Adil?* (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), hlm. 222-30.

dahan hingga sekarang.

Apa yang saya sebut sebagai akar yang dalam itu adalah transformasi kultural yang dialami oleh masyarakat Nusantara selama berabad-abad, baik dalam hubungannya dengan budaya-budaya asing, ataupun kreatifitas orang-orang pribumi sendiri dalam mengembangkan budaya yang ada. Interaksi dengan kebudayaan India, khususnya agama Hindu dan Budha, tidak bisa disangkal telah menimbulkan bekas yang mendalam dalam sejarah banyak wilayah di tanah air. Kedatangan Islam di masa selanjutnya, yang kira-kira mulai menyebar di abad ke-13, tentu saja merupakan gelombang transformasi kultural dan politik yang cukup hebat pula. Penyebaran Islam yang begitu pesat itu di antaranya ditopang oleh suatu medium penting, yaitu bahasa Melayu yang secara perlahan menjadi *lingua franca* di Nusantara. Bahkan, pada abad ke-18 dan ke-19, kita dapat menemukan beberapa karya tokoh-tokoh Islam yang cukup berbobot, yang ditulis dalam Bahasa Melayu dengan menggunakan huruf Arab.³

Kedatangan bangsa Barat mulai sekitar abad ke-16 di sebagian wilayah Nusantara, telah membuat suatu pengalaman kultural dan politik yang lain lagi. Persentuhan dengan Barat ini, yang kemudian berujung pada kolonialisme (yang nantinya menjadi mitos bahwa In-

donesia dijajah Belanda selama 350 tahun), membuat akibat-akibat negatif dan juga positif dari sudut pandang lahirnya nasionalisme Indonesia. Salah satu dampak positif dari kolonialisme terhadap nasionalisme adalah adanya pengalaman yang kurang lebih sama, yang dirasakan oleh orang-orang Nusantara yang berasal dari berbagai etnis dan pulau, yaitu pengalaman pahit sebagai orang-orang yang dijajah dan ditindas oleh Belanda. Kesamaan pengalaman ini secara perlahan mendorong suatu perlawanan bersama terhadap musuh bersama itu. Inilah pula tampaknya yang menjadi sebab mengapa negara yang disebut "Indonesia" ini terdiri dari wilayah-wilayah yang dulu dijajah oleh Belanda, dan mungkin ini pula sebabnya mengapa "Timor Timur" yang asalnya dijajah Portugis kemudian (dengan terpaksa atau ikhlas) dilepaskan.

Selain melahirkan kesamaan pengalaman pahit sebagai orang terjajah, kolonialisme juga mendorong lahirnya nasionalisme dari segi perkembangan bahasa Melayu. Bahasa ini, yang disebar-kan bersama-sama dengan penyebaran Islam, menjadi semakin pesat pertumbuhannya disebabkan oleh kebijakan eksklusif pemerintah kolonial yang tidak mau mengajarkan Bahasa Belanda kecuali kepada sebagian kecil kaum elit. Selain itu, Bahasa Melayu cenderung lebih

³ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu* (Bandung, Mizan, 1990).

egaliter ketimbang bahasa Jawa, meskipun bahasa yang terakhir ini digunakan oleh lebih dari 40% penduduk Nusantara. Demikianlah akhirnya, Bahasa Melayu menjadi bahasa yang secara *de facto* digunakan di banyak tempat di Indonesia sehingga tidak heran kalau bahasa ini kemudian ditransformasi menjadi Bahasa Indonesia dan menjadi salah satu poin dari Sumpah Pemuda 1928 yang terkenal itu.⁴

Di sisi lain, kolonialisme juga menimbulkan dampak negatif terhadap nasionalisme. Salah satunya adalah keterbelahan kultural yang terjadi di kalangan Muslim Indonesia yang kemudian bertarung di ranah politik ketika musuh bersama telah tiada. Keterbelahan itu terjadi di antaranya karena perbedaan dalam menyikapi kebudayaan asing yang dibawa oleh penjajah. Sebagian tokoh Islam memilih jalur non-kooperasi dengan menarik diri ke desa-desa, lalu membangun pesantren dan berdakwah. Sikap mereka kadang terkesan begitu eksklusif, misalnya sikap mengharamkan dasi karena ia dianggap pakaian orang kafir. Ada juga kelompok yang ingin mengadopsi sebagian dari kebudayaan Barat, tetapi pada saat yang sama ingin tetap mempertahankan budaya sendiri. Pendidikan

Taman Siswa yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara merupakan sebuah gerakan pendidikan yang mencoba mengadopsi sebagian kurikulum Barat seperti Bahasa Belanda dan matematika, namun ditambah dengan kurikulum khas yang banyak bernuansa budaya Jawa.⁵ Ini sebabnya Taman Siswa tak menerima subsidi dari pemerintah kolonial Belanda. Di sisi lain, sekolah-sekolah Muhammadiyah bersedia mengadopsi kurikulum pemerintah kolonial, dengan tambahan pelajaran agama, sehingga mereka mendapatkan subsidi dari pemerintah. Sikap Muhammadiyah ini antara lain didorong oleh keinginan untuk menyaingi sekolah-sekolah missionaris yang menerima subsidi dari pemerintah.⁶

Ketiga jenis pendidikan di atas: Pesantren, Taman Siswa, dan sekolah Muhammadiyah, adalah lembaga-lembaga pendidikan yang dimasuki oleh rakyat Indonesia, dan umumnya oleh kaum Muslim. Tentu saja, tidak sedikit juga kaum Muslim yang masuk ke sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah kolonial. Perbedaan kadar persentuhan dengan budaya Barat ini kemudian tampaknya melahirkan tokoh-tokoh gerakan dengan orientasi dan tipe yang berbeda-beda. Gerakan-gerakan sosial pra-kemerdekaan

⁴ Mochtar Pabotinggi, "How Language Determined Indonesian Nationalism" *Prisma: The Indonesian Indicator* No. 50 (September, 1990), hlm. 7-24.

⁵ Kenji Tsuchiya, *Democracy and Leadership: The Rise of the Taman Siswa Movement in Indonesia* Terj. Peter Hawkes (Honolulu: University of Hawaii Press, 1987).

⁶ Alfian, *Islamic Modernism in Indonesian Politics: The Kaum Muda Movement during the Dutch Colonial Period, 1912-1942* (PhD thesis, University of Wisconsin, 1969).

itu secara kasar dapat dibagi menjadi dua: mereka yang mendirikan gerakan atas nama Islam, dan mereka yang mendirikan gerakan berdasarkan ideologi sekular seperti nasionalisme dan komunisme. Di masa dekade terakhir penjajahan Belanda, kelompok-kelompok yang mendapatkan pendidikan Barat nampaknya lebih menonjol dalam gerakan-gerakan sosial politik, baik dalam gerakan Islam ataupun sekular, ketimbang mereka yang berasal dari pesantren. Baru kemudian setelah Jepang datang, kelompok Muslim berbasis pesantren mendapatkan perhatian lebih dari penguasa baru ini, terutama karena keinginan mereka untuk memobilisasi massa Muslim dalam rangka perang Asia Raya.⁷

Masa Kemerdekaan: Kompromi-Kompromi

Di atas telah dijelaskan bahwa gerakan-gerakan kemerdekaan secara kasar dapat dibagi kepada dua kelompok, yaitu yang berdasarkan Islam dan yang berdasarkan ideologi sekular. Tetapi perbedaan ini jika dilihat dari pribadi tokoh-tokohnya tidaklah hitam-putih. Meskipun beberapa tokoh gerakan kemerdekaan

Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sjahrir tidak mendasarkan gerakan mereka pada Islam, secara pribadi mereka beragama Islam. Soekarno bahkan sempat tinggal cukup lama di rumah Cokroaminoto, tokoh Sarekat Islam, sedangkan Hatta adalah anak seorang guru Tarekat di Sumatera Barat. Di sisi lain, tokoh-tokoh gerakan Islam seperti H. Agus Salim, M. Natsir dan Mohammad Roem adalah orang-orang yang pernah mengecap pendidikan Belanda.

Terlepas dari adanya kedekatan di atas, sejarah mencatat bahwa benturan-benturan ideologis tak bisa dihindari pula. Pada Sidang BPUPK tahun 1945, sejarah mencatat adanya dua pandangan yang



labulia.blogspot.com

⁷ Harry J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation* (Den Haag: van Hoeve, 1958).

berbeda mengenai dasar Negara: satu berdasarkan Islam dan satu lagi berdasarkan kebangsaan. Setelah negosiasi, kompromi akhirnya dibuat, yaitu bahwa prinsip pertama dasar negara adalah "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Rumusan tentang syariat Islam inilah yang kemudian dikenal dengan "tujuh kata" dari Piagam Jakarta. Sejarah juga mencatat bahwa kompromi ini kemudian dibatalkan lagi pada tanggal 18 Agustus 1945 karena keberatan dari tokoh-tokoh Kristen di Indonesia Timur sehingga rumusannya menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang menjadi sila pertama dari Pancasila.⁸

Kelompok gerakan Islam memang kecewa terhadap kompromi susulan itu, tetapi mereka masih dapat bersabar untuk menunggu saat yang tepat di mana Islam sebagai ideologi akan diperjuangkan lagi. Di sisi lain, Proklamasi Kemerdekaan 1945 ternyata tidak mengakhiri perjuangan kemerdekaan karena Belanda masih ingin kembali menguasai Indonesia. Dalam perang revolusi ini, golongan Islam mengumandangkan jihad fi sabilillah terhadap Belanda. Di sisi lain, golongan kebangsaan semakin menyadari bahwa golongan Islam harus diakomodasi demi terciptanya persatuan nasional

dalam menghadapi musuh bersama. Maka sejarah mencatat, Sutan Sjahrir, selaku Perdana Menteri, mendirikan Departemen Agama, pada bulan Januari 1946.⁹ Meskipun Departemen Agama juga mewadahi agama-agama besar lainnya di Indonesia, dalam kenyataannya, ia merupakan lembaga yang sebagian besar mewadahi kepentingan Islam.

Dua wujud kompromi antara golongan kebangsaan dan golongan Islam di atas, yaitu rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan berdirinya Departemen Agama, telah menandai suatu yang unik dari hasil dialektika antara nasionalisme dan Islam. Negara kita telah menjadi negara "bukan-bukan", yang bukan sekular seperti yang diinginkan oleh golongan kebangsaan, dan bukan pula berdasarkan Islam seperti yang dikehendaki oleh golongan Islam. Rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa" memang tak jelas-jelas merujuk kepada Islam, tetapi tidak juga dapat dianggap sekular. Kelompok Islam biasanya menekankan arti "Yang Maha Esa" sebagai doktrin tauhid dalam Islam, sedangkan kalangan lain biasanya menekankan keluasan dan ketidakjelasan makna kata "Ketuhanan" yang tidak sama dengan kata "Tuhan". Justeru karena tak jelas "jenis kelamin" negara kita ini, maka selalu ada peluang

⁸ Untuk kajian tentang Piagam Jakarta dari perspektif seorang pendukung, lihat Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

⁹ Deliar Noer, *The Administration of Islam in Indonesia* (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1978), hlm. 33.

bagi Islam untuk bertengkar atau berdamai dengan nasionalisme. Eksistensi Departemen Agama saya kira dapat dinilai sebagai wujud kelembagaan dari integrasi Islam dan nasionalisme itu.

Sejarah bangsa kita di masa-masa selanjutnya menunjukkan bahwa kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan itu tetap terus bertahan, dan tidak pernah satu pihak mengalahkan pihak lainnya secara total. Memang pendulum kadang bergerak ke arah sekular, dan kadang pula ke arah agama. Tetapi tidak pernah pendulum itu bergerak sampai ke sisi yang paling ujung. Ini menunjukkan bahwa kompromi yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa ini memang sesuai dengan kekuatan-kekuatan yang ada dalam realitas politik di Indonesia.

Perkembangan politik sekitar dua dekade setelah kemerdekaan menunjukkan betapa proyek negara bangsa yang bernama Indonesia itu harus menghadapi berbagai tantangan separatisme, karena alasan-alasan kedaerahan, kekecewaan politik dan keagamaan, atau gabungan dari ketiganya. Pemberontakan Kartosuwiryo dan tokoh-tokoh lain yang memproklamkan Negara Islam Indonesia, dan juga pemberontakan PRRI, semuanya berhasil dipatahkan oleh pemerintah



nuranidunia.or.id

pusat. Sementara itu, pemilu 1955 yang demokratis telah membuka jalan bagi pertarungan politik secara damai dan konstitusional. Setelah pemilu itu, debat ideologis pun dibuka lagi antara golongan kebangsaan dan golongan Islam di Sidang Konstituante yang berujung pada jalan buntu karena masing-masing pihak tidak ada yang memperoleh minimal mayoritas dua pertiga suara. Dengan dukungan militer, Soekarno kemudian membuat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menyatakan kembali ke UUD 1945, namun pada saat yang sama Piagam Jakarta disebut sebagai “menjiwai” dan “merupakan satu kesatuan dengan” Undang-Undang tersebut.¹⁰

Masa selanjutnya adalah era Demokrasi Terpimpin (1959-1966) di mana Soekarno mencoba menawarkan sejenis

¹⁰ Lihat misalnya, Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985); dan Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration for Constitutional Government: a Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959* (Jakarta: Sinar Harapan, 1992).

ideologi sintesis yang disebut NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis), suatu pandangan yang sudah pernah ditulisnya tahun 1926.¹¹ Satu kelompok besar dari golongan Islam, yakni Partai Masyumi, menolak Demokrasi Terpimpin, dan sebagian pimpinannya terlibat dalam pemberontakan PRRI. Soekarno kemudian membubarkan Masyumi tahun 1960, dan memenjarakan beberapa tokoh penting partai itu. Golongan Islam lainnya, yakni Nahdlatul Ulama (NU), bersedia bergabung dengan Demokrasi Terpimpin, dan selama periode itu praktis Departemen Agama selalu dibawah kendali orang-orang NU.¹²

Jatuhnya Soekarno tidak lama menyusul Gerakan 30 September 1965 dan naiknya tentara (Angkatan Darat) ke panggung kekuasaan dengan memproklamakan apa yang disebut "Orde Baru" ternyata tidak membuat isu hubungan agama dan negara menjadi sepi.¹³ Pada mulanya, dengan melihat Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai musuh bersama, tentara mendukung aspirasi golongan Islam yang ingin memperkuat agama melalui jalur pendidikan. Maka sidang MPRS

tahun 1966 memutuskan bahwa pelajaran agama diwajibkan mulai lembaga pendidikan tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk membendung komunisme yang dinilai anti-agama dan tak bertuhan. Di kalangan golongan Islam sendiri muncul harapan baru bahwa Piagam Jakarta seharusnya bisa dikonstitusikan mengingat PKI yang cukup kuat itu sekarang sudah lenyap. Tetapi mimpi golongan Islam itu tak pernah jadi kenyataan karena tentara, didukung oleh kalangan sipil sekular serta kaum minoritas keagamaan, menolak ambisi ideologis golongan Islam tersebut.

Secara politis, perkembangan politik di atas berarti bahwa setelah musuh bersama (PKI) kalah, maka lawan politik tentara adalah golongan Islam yang dulu menjadi temannya. Dengan demikian, proyek politik Orde Baru adalah "depolitisasi Islam" dan pada saat yang sama, menyokong kegiatan-kegiatan agama yang bersifat seremonial dan ritual, suatu kebijakan yang mengingatkan orang pada nasihat Snouck Hurgronje kepada pemerintah kolonial Belanda. Orde Baru memaksakan "Pancasila" sebagai satu-

¹¹Tulisan ini kemudian diterjemahkan ke Bahasa Inggris. Lihat Soekarno, *Nationalism, Islam and Communism* Terj. Karel H. Warouw dan Peter D. Weldon (Ithaca: Modern Indonesia Project, 1970).

¹²Tentang Demokrasi Terpimpin, lihat Herbert Feith, "The Dynamics of Guided Democracy" dalam Ruth T. McVey (ed.), *Indonesia* (New Haven: HRAF Press, 1963), 309-409. Untuk kajian mengenai NU dalam periode ini, lihat misalnya Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967* Terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 239-97.

¹³ Analisis berikut mengenai perkembangan masa Orde Baru diringkaskan dari Mujiburrahman, *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order* (Amsterdam: Amsterdam University Press/ISIM, 2006).

satunya ideologi yang sah, dan sejak 1969, melarang siapapun berbicara mendukung Piagam Jakarta di depan publik. Sejak Tap MPR Nomor 2 Tahun 1978 dikeluarkan, pemerintah bergerak melakukan indoktrinasi ideologis melalui penataran P4, dan melalui pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) di sekolah-sekolah. Tahun 1985, pemerintah bahkan mengeluarkan Undang-Undang yang mewajibkan semua organisasi massa untuk berasas tunggal Pancasila. Perlu dicatat bahwa menurut ideologi Orde Baru, ada dua ideologi ekstrem yang menjadi musuh negara: ekstrem kiri adalah komunis dan ekstrem kanan adalah Islam.

Sekurang-kurangnya hingga paruh pertama tahun 1980-an, orientasi ideologi pemerintah Orde Baru jelas kepada nasionalisme sekular. Meskipun demikian, hampir setiap usaha sekularisasi yang dilakukan pemerintah mendapat tantangan dari golongan Islam. Sejak akhir tahun 1960-an, sudah berhembus suara-suara untuk menghapuskan Departemen Agama, tetapi karena protes keras dari golongan Islam, penghapusan itu tak pernah dilakukan. Demikian pula dalam sidang MPR tahun 1972, Golkar pernah berusaha menghapus pelajaran agama di sekolah dan menggantikannya dengan PMP. Tetapi karena perlawanan dari golongan Islam, akhirnya kedua pelajaran itu ditetapkan sebagai pelajaran wajib. Di akhir tahun 1973, golongan Islam dikejutkan dengan RUU Perkawinan yang diajukan pemerintah ke DPR yang isinya sangat sekular dan bertentangan dengan hukum Islam. Setelah protes yang terus-

menerus, akhirnya dibuat juga kompromi sehingga lahirlah UU Perkawinan 1974 yang sampai kini masih berlaku.

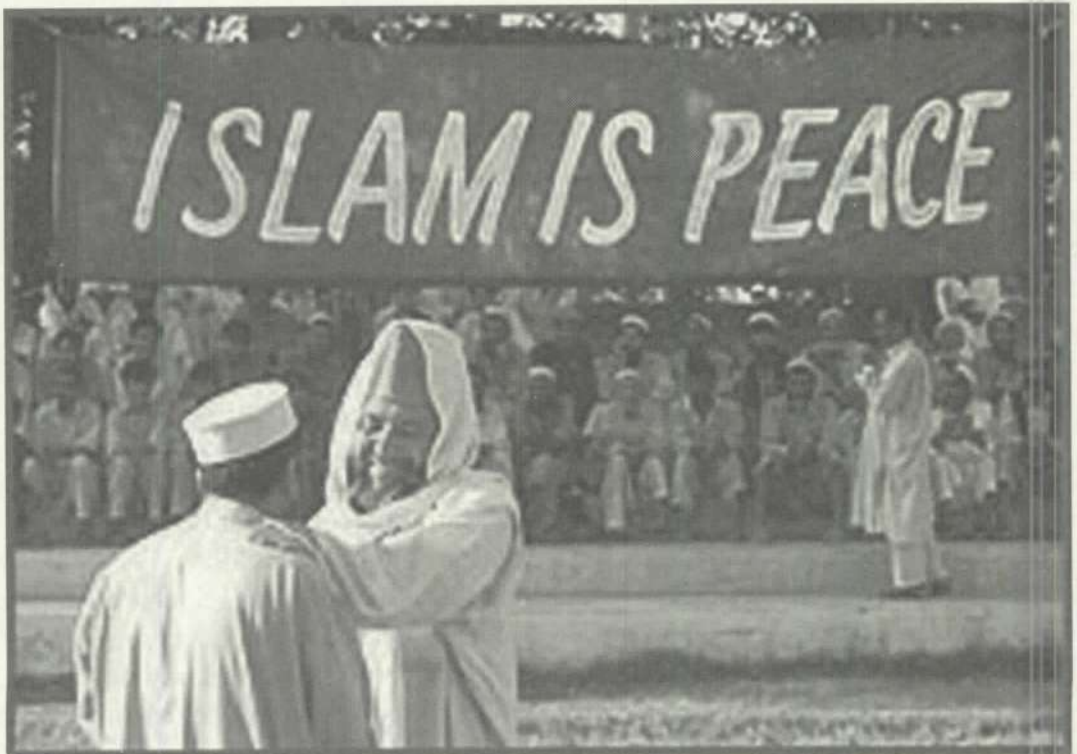
Di sisi lain, kebijakan depolitisasi Islam Orde Baru telah mendorong kalangan muda golongan Islam untuk memikirkan ulang perlu tidaknya menjadikan Islam sebagai ideologi. Kalangan Muslim reformis adalah kelompok yang paling awal mempertanyakan masalah ini karena mereka memang telah tersingkir di masa Soekarno, dan Soeharto pun tidak mau merehabilitasi partai mereka, Masyumi. Maka dari sinilah muncul slogan Nurcho-lish Madjid: "Islam Yes, Partai Islam No?" yang terkenal itu. Cak Nur menegaskan bahwa perjuangan Islam tidak identik dengan partai Islam, dan konsep negara Islam tidak perlu. Pemikiran yang sama kemudian juga berkembang di kalangan NU, meskipun agak terlambat. Keterlambatan ini di antaranya karena NU masih bisa aktif di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), meskipun lahan mereka di Departemen Agama sudah diambil alih oleh kalangan Muslim reformis sejak masa Mukti Ali (1972). Pandangan Islam non-ideologis di kalangan NU ini mulai menggelinding di awal 1980-an ketika organisasi tersebut menyatakan kembali ke khittah 1926 sebagai organisasi sosial keagamaan, bukan politik.

Di tahun 1990-an, Soeharto mulai melirik golongan Islam yang diharapkan dapat memperkuat posisinya untuk terus berkuasa. Sebelumnya, tahun 1989, pemerintah mendukung UU Pendidikan Nasional yang mengakomodasi sebagian tuntutan golongan Islam, dan

pada tahun yang sama pula, UU Peradilan Agama disahkan. Angin segar seolah terus berhembus bagi golongan Islam ketika Soeharto mendukung ICMI, dan dia sekeluarga menunaikan ibadah haji. Meskipun kali ini pendulum mulai bergerak ke arah Islam, pemerintah tetap tidak pernah mendukung Islam sebagai ideologi. UU Peradilan Agama misalnya, tetap memberi kebebasan bagi kaum Muslim untuk memilih penyelesaian masalah waris dan hibah (kecuali perkawinan), di pengadilan agama atau di pengadilan negeri. Demikian pula, ketika Soeharto mendukung Festival Istiqlal, dia menegaskan bahwa acara itu harus menjadi

“pesta kebudayaan Indonesia yang bernafaskan Islam” yang secara implisit menolak ideologisasi Islam.

Jatuhnya Soeharto di tahun 1998 dan lahirnya era reformasi memang telah membuka katup-katup yang selama ini ditutup rapat oleh penguasa. Gerakan Islam ideologis yang sebelumnya dibungkam pemerintah Orde Baru kini mulai bermunculan lagi. Tetapi pergumulan Islam dan nasionalisme tetap saja berada di wilayah abu-abu, wilayah yang menjadi titik kompromi sekaligus sengketa itu. Dua tokoh Islam Indonesia terkemuka, Abdurrahman Wahid dari NU dan Amien Rais dari Muhammadiyah justeru memilih



islam.peace.usip

untuk mendirikan partai yang berideologi nasionalis, bukan Islam. Sementara partai-partai lain seperti PPP, PBB dan PKS menggunakan asas Islam. Hasil pemilu 1999 dan 2004 yang lalu ternyata tidak membuat partai-partai Islam menjadi dominan, meskipun di sisi lain, tokoh-tokoh golongan Islam mulai menduduki jabatan-jabatan penting kenegaraan.

Suatu perkembangan yang agaknya berbeda dengan masa-masa sebelumnya di kalangan golongan Islam saat ini adalah munculnya pemikiran yang benar-benar sekular di satu pihak, dan benar-benar Islam-universalis-ideologis di pihak lain. Kalau para pemikir Muslim Orde Baru kebanyakan masih berupaya mencari jalan untuk mengintegrasikan paham keislaman dan kebangsaan, sebagian pemikir muda Muslim saat ini justru ingin secara total melepaskan Islam dari negara dan menjadikan kebangsaan sebagai satu-satunya prinsip dalam kehidupan bernegara. Di sisi lain, kalau para politisi Muslim dulu ingin mendirikan negara Islam di Indonesia, sebagian aktifis Muslim saat ini, khususnya yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia, tidak hanya ingin mendirikan negara Islam, melainkan khilafah Islamiyah yang bersifat universal untuk seluruh dunia Islam.

Dari paparan di atas kita dapat melihat bagaimana Islam terus berdialektika dengan nasionalisme di Indonesia. Paparan historis yang telah saya kemukakan itu menunjukkan bahwa Islam tidak selalu bermusuhan dengan nasionalisme. Kadangkala terjadi hubungan yang saling mendukung, bahkan berin-

tegrasi satu sama lain. Hasil survei PPI mengenai Islam dan Kebangsaan yang tengah kita bahas nampaknya juga mendukung tesis saya ini. Dengan ungkapan lain, saya cenderung untuk melihat hasil survei ini dari kerangka hubungan dialektis, bukan diametrik antara Islam dan kebangsaan.

Beberapa hasil survei ini jelas menunjukkan bahwa penerimaan kaum Muslimin terhadap Pancasila sangat besar, sementara keinginan mendirikan negara Islam jauh lebih kecil. Sebanyak 76 % responden mengatakan perlu menghidupkan kembali Pancasila (P4), sebanyak 90.4% mengatakan bahwa aturan agama harus diselaraskan dengan Pancasila dan UUD'45, dan 91.6% mengatakan bahwa Pancasila dan UUD '45 harus menjadi acuan berbangsa dan bernegara. Sementara itu ada 84.7% responden setuju dengan NKRI yang berdasarkan Pancasila, dan hanya 22.8% yang menginginkan negara Islam.

Angka-angka di atas jelas menunjukkan bahwa penerimaan kaum Muslimin terhadap ideologi Pancasila saat ini sangat besar, apalagi jika kita mengingat voting di sidang Konstituante di akhir tahun 1950-an di mana baik pendukung Pancasila ataupun negara Islam tak ada yang memperoleh mayoritas minimum dua pertiga suara. Perubahan sikap kaum Muslim, khususnya mereka yang tergabung dalam gerakan-gerakan Islam, memang lebih tampak di era reformasi ini sewaktu terjadi amandemen UUD '45 pada Sidang Tahunan MPR 2002 yang lalu di mana hanya sedikit kaum Muslim yang mendo-

kung pencantuman tujuh kata Piagam Jakarta pada pasal 29 UUD '45.¹⁴ Mungkin ini karena PAN dan PKB tidak mendasarkan partai mereka pada Islam sebagai ideologi, dan juga karena Golkar, yang selama masa reformasi ini dipimpin oleh mantan Ketua HMI (Akbar Tanjung), tetap konsisten pada asas kebangsaannya.

Pertanyaannya: apakah perubahan ini karena kebangsaan telah mengalahkan keislaman? Kalau kita mengikuti kerangka diametrik survei ini, maka jawabnya jelas positif. Tetapi jika dilihat secara dialektis, yang terjadi nampaknya bukan yang satu mengalahkan yang lain, melainkan karena usaha yang cukup berhasil di kalangan cendekiawan Muslim dalam mengintegrasikan paham keislaman dan kebangsaan. Cak Nur tidak hanya berseru "Islam Yes, Partai Islam No?", melainkan juga secara sistematis mengajukan wacana trilogi antara keislaman, kemodernan dan keindonesiaan. Keterlibatan orang-orang HMI di Golkar sejak masa Orde Baru jelas mendapatkan justifikasi dari teologi sekularisasi yang dikembangkan Cak Nur sejak awal 1970-an. Demikian pula, ketika Gus Dur dkk menggelindingkan ide agar NU kembali ke khittah 1926, implikasinya tidak sekadar bahwa NU secara kelembagaan keluar dari PPP dan anggotanya bisa masuk Golkar, tetapi juga dikukuhkannya pandangan mengenai integrasi paham keislaman dan kebangsaan melalui ide tentang pribumisasi Is-

lam. Maka hasil survei di atas bisa dilihat sebagai indikator bahwa keislaman dan keindonesiaan sudah semakin terintegrasi.

Namun survei ini menunjukkan beberapa hal yang dinilai oleh PPIM tidak sejalan dengan nasionalisme. Misalnya, 44% responden merasa sebagai orang Indonesia, dan 43% merasa sebagai orang Islam. Ini seolah menunjukkan bahwa mereka yang menjadikan Islam sebagai identitas diri hampir sama besarnya dengan mereka yang menjadikan kebangsaan sebagai dasar identitas. Tetapi kalau ditinjau lebih cermat, dua kelompok responden itu bisa saja memilih jawaban yang abu-abu: misalnya merasa sebagai orang Islam berkebangsaan Indonesia, atau merasa sebagai orang Indonesia yang beragama Islam. Dua posisi ini jelas berbeda, tetapi tidak hitam putih seperti rumusan survei ini.

Yang dianggap paling mengganggu nasionalisme adalah apa yang disebut oleh survei ini sebagai sikap intoleransi kaum Muslim terhadap non-Muslim. Misalnya, sebanyak 62.4% responden tidak membolehkan non-Muslim jadi presiden, dan hanya 35.3% yang membolehkan. Ada 64% yang membolehkan non-Muslim menjadi guru di sekolah umum, dan 33.5% tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan acara kebaktian di lingkungan sekitar sebanyak 55.3%, dan yang membolehkan 42.2%. Adapun mengenai pembangunan gereja, 45.8% membole-

¹⁴ Lihat "Perubahan Keempat UUD 1945 Disahkan" *Kompas*, 11 Agustus 2002.

kan, sedangkan yang tidak membolehkan 51.6%. Lebih jauh survei ini menemukan bahwa "intoleransi keagamaan memiliki hubungan positif dengan sikap menjadikan agama sebagai dasar perumusan identitas utama."

Jika kita melihat data di atas dalam kerangka dialektis, bukan oposisi semata antara Islam dan nasionalisme, maka tafsirannya akan berbeda. *Pertama*, katakanlah bahwa memang tengah terjadi tarik-menarik antara Islam dan nasionalisme di sini, namun yang satu tidak ada yang benar-benar mengalahkan yang lain secara total. Meskipun ada 62.4% yang menolak non-Muslim jadi presiden, *toh* masih ada 33.5% yang menerima. Sebaliknya, meskipun ada 33.5% yang tidak membolehkan non-Muslim jadi guru di sekolah umum, *toh* masih ada 64% yang membolehkan. Apalagi mengenai pembangunan gereja yang angkanya hampir berimbang, 45.8% membolehkan dan 51.6% menolak.

Kedua, masalah intoleransi sangat berbahaya jika sekadar dirumuskan dalam hubungannya dengan sikap menjadikan agama sebagai dasar perumusan identitas. Agama bukanlah suatu paham tertutup yang monolitik, melainkan terbuka pada berbagai tafsiran. Bisa saja orang sangat toleran kepada penganut agama lain karena menurut pemahamannya, justeru sikap seperti itulah yang dianjurkan oleh agamanya. Selain itu, apakah benar bahwa menolak non-Muslim menjadi presiden di negara yang mayoritas beragama Islam merupakan wujud intoleransi? Meskipun konon nasionalisme orang Amerika

sangat tinggi, tetapi saya ragu kalau mereka membolehkan orang Islam jadi presiden Amerika. Artinya, "toleransi" tidak harus dihadapkan dengan "kewajaran", karena keduanya dapat sejalan. Lebih-lebih soal sensitif berkenaan dengan guru non-Muslim dan pembangunan gereja yang masalahnya jelas tidak sekadar karena "menjadikan agama sebagai dasar perumus identitas utama" melainkan campuran aneka masalah yang kompleks, dari politik, sosial ekonomi, budaya hingga psikologis yang telah mempengaruhi hubungan Muslim-Kristen selama ini di Indonesia. Dengan kata-kata lain, pengarusutamaan nasionalisme seperti yang disarankan oleh PPIM bukanlah jalan keluar utama dari masalah rumit yang satu ini.

Sebagian hasil survei ini malah menunjukkan bahwa persoalan utama nasionalisme kita bukanlah karena ia "diancam" oleh Islam, melainkan karena negara yang mengklaim legitimasi atas dasar kebangsaan justeru tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kalau menjadi sasaran kriminal, masyarakat lebih mengutamakan perlindungan RT/RW/Kelurahan (45.4%) atau keluarga (31.5%) ketimbang polisi (16.8%). Jika kekurangan makanan dan obat-obatan, masyarakat lebih suka minta bantuan ke tetangga (44.6%) atau ke RT/RW/Kelurahan (35%) ketimbang ke dinas sosial (10.9%). Kepercayaan terhadap ulama 41%, sedangkan terhadap presiden dan tentara hanya 22%, apalagi terhadap DPR yang hanya 11%.

Apa artinya ini semua? Saya kira

ketidakpercayaan rakyat pada lembaga-lembaga kenegaraan itu menunjukkan bahwa nasionalisme yang menjadi dasar legitimasi lembaga-lembaga tersebut belum berhasil mewujudkan apa yang diamanatkan kepada mereka oleh Pancasila dan UUD '45. Boleh jadi, sila pertama, ketiga dan keempat dari Pancasila, yakni hal-hal yang terkait dengan agama, persatuan dan demokrasi, sudah banyak yang terlaksana. Tetapi bagaimana dengan dua sila lainnya: "Kemanusiaan yang adil dan beradab" (sila kedua), dan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" (sila kelima)? Saya kira, jika negara berhasil mewujudkan kedua sila itu dalam kenyataan hidup rakyat, nasionalisme akan semakin kokoh. Demikian pula jika hubungan dialektis antara Islam dan

nasionalisme dapat didorong ke arah integrasi yang berujung pada pembelaan secara bersama-sama terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, maka integrasi itu akan semakin mantap.¹⁵ Kita tidak perlu chauvinisme yang berslogan "right or wrong, my country". Yang kita perlukan adalah suatu bangsa yang memiliki keteguhan moral bahwa "right or wrong is right or wrong!" Mungkin ini sebuah mimpi. Tetapi nasionalisme memang sebuah mimpi yang terus menerus ingin diwujudkan dalam kenyataan. Seperti kata Ben Anderson, nasionalisme pada dasarnya adalah ide tentang komunitas terbayang (*imagined community*), yang dalam kenyataan sebenarnya seringkali majemuk, terpisah-pisah dan bahkan tidak saling mengenal.¹⁶ ❖

¹⁵ Pemikiran semacam ini antara lain telah dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid dan Romo Mangunwijaya. Lihat Mujiburrahman, "Islam and Politics in Indonesia: The Political Thought of Abdurrahman Wahid" *Islam and Christian-Muslim Relations* Vol. 10 No. 3 (October, 1999), hlm. 339-352; dan Mujiburrahman, "The Diaspora Church in Indonesia: Mangunwijaya on Nationalism, Humanism and the Catholic Praxis" *Journal of Ecumenical Studies* Vol. 38 No. 4 (Fall, 2001), hlm. 425-449.

¹⁶ Benedict Anderson, *Imagined Communities, Komunitas-Komunitas Terbayang* Terj. Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Insist Press, 2001).